

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Putri Hafsari

No Mahasiswa : 16312265

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Putri Hafsari

No. Mahasiswa: 16312265

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 5 Mei 2020

Penulis,



(Putri Hafsari)

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 6 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

Disusun Oleh : **PUTRI HAFSARI**

Nomor Mahasiswa : **16312265**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 16 Juni 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S. Ar Ra'du : 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

“Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu, tidaklah akan menimpamu. Dan apa yang ditetapkan akan menimpamu, tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan kemudahan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

“Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”

(HR. Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi Al-Hakim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini aku persembahkan untuk:

Papa dan Mama tercinta

-Drs. Saiful Umar dan Sri Rahayu-

Do'a dan dukungan yang selalu diberikan dalam setiap langkahku, perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya untukku.

-Abang Budi, Kak Rina, dan Adik Khansa-

Yang memberikan semangat dan kasih sayangnya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “**Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**” penyusunan skripsi ini ditulis untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan dorongan, dan bantuan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya dan petunjuk serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Aamiin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.

3. Kedua orang tua Bapak Drs. Saiful Umar dan Ibu Sri Rahayu yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran, ide, dan nasihatnya. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala perjuangan dan doa Bapak Ibu.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. CA.MCA., Dr. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
9. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
10. Abang tercinta, Budi Santoso, S.Kom. beserta isterinya tercinta Kak Rina Achmad terimakasih telah memberikan semangat, kasih sayang dan segala doanya.
11. Adik tercinta, Khansa Tri Astusi terimakasih telah menghibur dan memberikan doa.

12. Kekasihku Ardial Saputra yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, nasihat, arahan lebih, dan selalu ada saat sedih maupun senang agar penulis bisa menjadi seseorang yang mandiri dan kuat.
13. Sahabat yang satu kos dari awal masuk kuliah hingga akhir, Theresa Kintan Wigati Gunawan terimakasih telah setia ikut pindah kos, setia dalam keadaan sakit, sedih, bahagia, dan selalu berbagi kerecehan dunia ini.
14. Sahabat Kuli(ah) seperjuangan dari semester awal sekelas hingga saat ini Nuken, Yuliana, Melisa, Sakila, Aul, Aau, Lailla, Dina, dan Sri. Terimakasih, semoga di waktu yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang lebih baik.
15. Sepupu tersayang, mba Dwi Hernamani terimakasih telah menjadi tempat curhat, menjadi dokter pribadi, pemberi nasihat, dan penyemangat dalam pembuatan skripsi ini.
16. Alda Novita teman dan calon adik yang selalu berbagi cerita suka duka dunia perkuliahan.
17. Teman-teman KKN unit 298 Kebumen, Audina, Vuan, Mayang, Angel, Karel, Yugsa, dan Dalu terimakasih pertemuan, pelajaran, pengalaman, dan kerjasama hingga KKN bisa terlaksana dengan baik.
18. Teman-teman seperbimbingan Afi, Aulia, Wardina, Runi dan Adin yang saling membantu dalam setiap urusan skripsi.
19. Teman-teman di kampung halaman yang selalu support dari jauh Dedek, Anggi, Sinta dan lainnya.

20. Teman-teman jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2016.

21. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran kearah perbaikan sangat diperlukan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2020

Penulis,



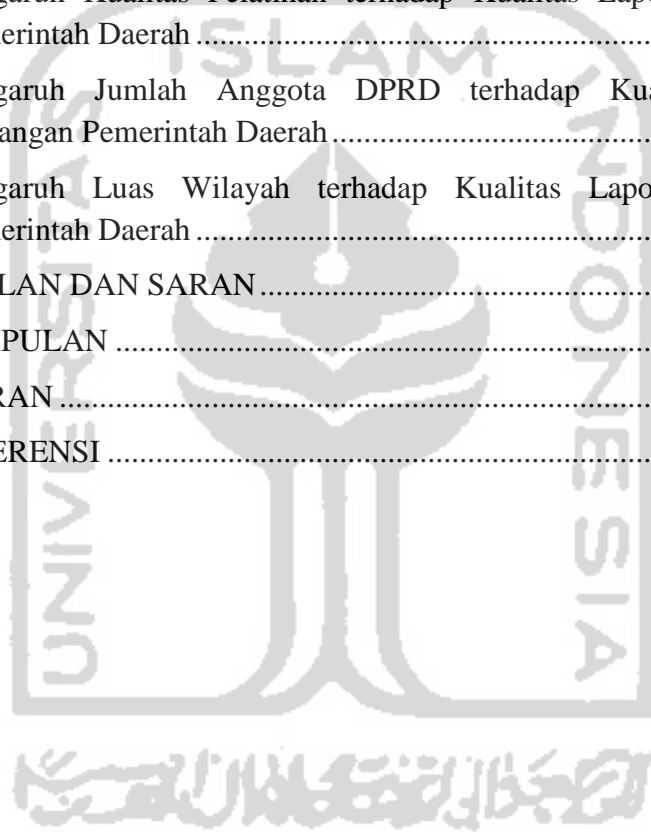
Putri Hafsari

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	8
2.1.2 Teori Agensi.....	9
2.1.3 Teori Institusional	10
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	12
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	14
2.2.2 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah.....	15
2.2.3 Kualitas Pelatihan.....	16
2.2.4 Jumlah Anggota DPRD.....	16
2.2.5 Luas Wilayah.....	17
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....	18

2.3.1	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.3.2	Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2.3.3	Pengaruh Kualitas Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.3.4	Pengaruh Jumlah Anggota DPRD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.3.5	Pengaruh Luas Wilayah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.4	KERANGKA PEMIKIRAN	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		25
3.1	POPULASI DAN SAMPEL	25
3.2	VARIABEL PENELITIAN	26
3.2.1	Variabel Dependen (Y)	26
3.2.2	Variabel Independen (X).....	27
3.2.3	Variabel Kontrol.....	31
3.3	METODE PENGUMPULAN DATA.....	31
3.4	TEKNIK ANALISIS DATA.....	32
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	32
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	32
3.4.3	Analisis Regresi Berganda	33
3.4.4	Uji Koefisien Determinasi.....	34
3.4.5	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN		36
4.1	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	36
4.2	UJI ASUMSI KLASIK	40
4.2.1	Uji Normalitas	40
4.2.2	Uji Multikolinearitas	41
4.2.3	Uji Heterokedastisitas	43
4.3	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	44
4.4	UJI KOEFISIEN DETERMINASI	46

4.5	UJI HIPOTESIS	47
4.5.1	Uji t (Uji Parsial)	47
4.6	PEMBAHASAN	49
4.6.1	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	49
4.6.2	Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
4.6.3	Pengaruh Kualitas Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	52
4.6.4	Pengaruh Jumlah Anggota DPRD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53
4.6.5	Pengaruh Luas Wilayah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		56
5.1	SIMPULAN	57
5.2	SARAN	58
DAFTAR REFERENSI		60



DAFTAR TABEL

3.1 Skala Opini BPK	27
3.2 Skala Tingakt Pendidikan Kepala Daerah	29
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2 Hasil Uji Normalitas	41
4.3 Uji Multikolonieritas	42
4.4 Analisis Regresi Berganda	45
4.5 Uji Koefisien Determinasi	47



DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Model Penelitian24

4.1 Gambar Grafik Heterokedasitas44



DAFTAR LAMPIRAN

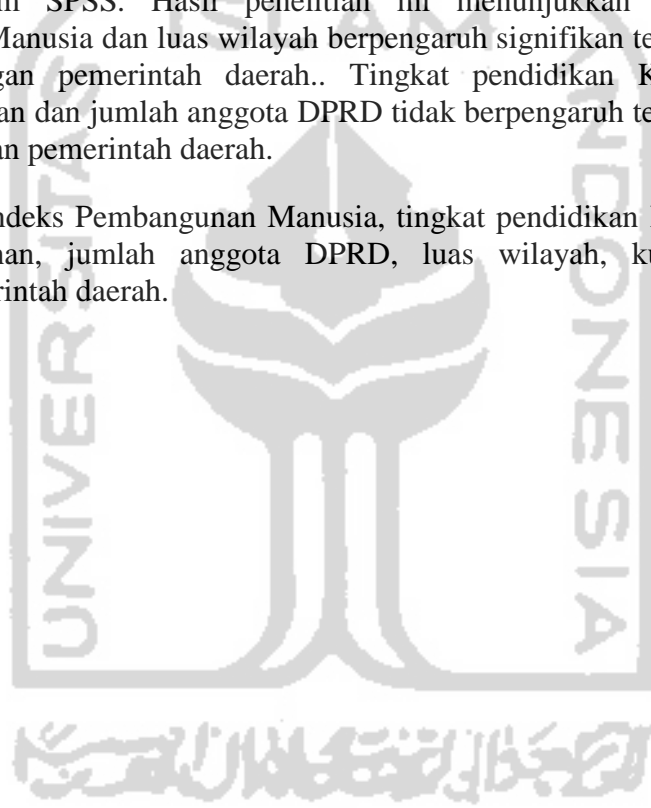
Lampiran 1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	64
Lampiran 2 Indeks Pembangunan Manusia	67
Lampiran 3 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	70
Lampiran 4 Kualitas Pelatihan	73
Lampiran 5 Jumlah Anggota DPRD	76
Lampiran 6 Luas Wilayah	79
Lampiran 7 Umur Administratif Pemerintah Daerah Dan Jumlah Penduduk	82
Lampiran 8 Hasil Uji Dan Regresi	85



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, Kualitas Pelatihan, jumlah anggota DPRD dan luas wilayah merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 Kabupaten/Kota di Indonesia menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.. Tingkat pendidikan Kepala Daerah, Kualitas pelatihan dan jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

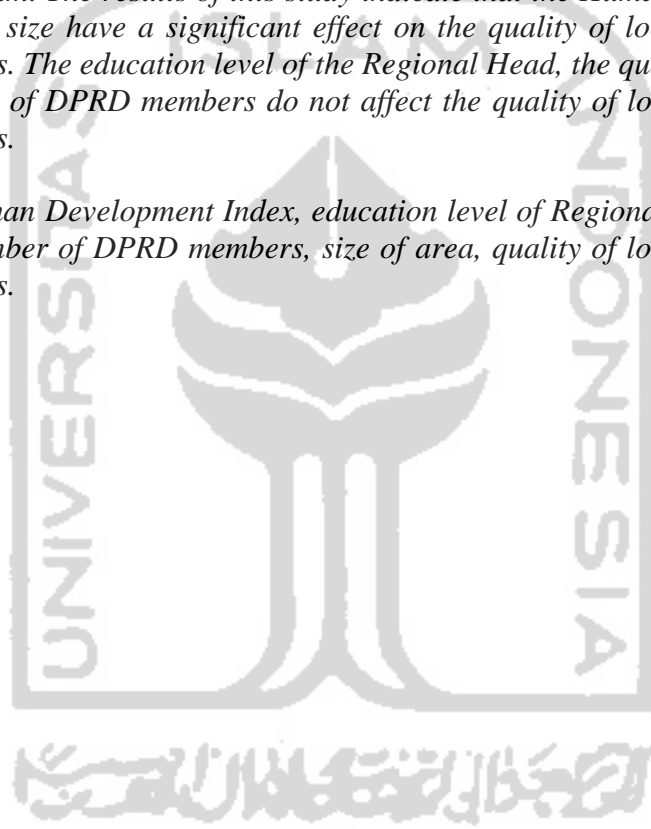
Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD, luas wilayah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect the quality of local government financial reports in Indonesia. Human Development Index, education level of Regional Head, Training Quality, number of DPRD members and area size are the independent variables used in this study. The population used in this study were 89 regencies / cities in Indonesia using the purposive sampling method. The analytical method used in this study uses multiple linear regression analysis with the SPSS program. The results of this study indicate that the Human Development Index and area size have a significant effect on the quality of local government financial reports. The education level of the Regional Head, the quality of training and the number of DPRD members do not affect the quality of local government financial reports.

Keywords: *Human Development Index, education level of Regional Head, quality of training, number of DPRD members, size of area, quality of local government financial reports.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini dalam pemerintah daerah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Upaya Pemerintah Daerah adalah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi kepada *stakeholder* yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Laporan keuangan yang berkualitas dilihat dari opini yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini tersebut mempunyai tingkat yang tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Menurut Pujanira dan Taman (2017) Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I-2016 untuk tahun pelaporan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih banyak

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan opini untuk menginformasikan kepada DPR/DPRD, *stakeholder*, dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD pada tahun 2017 terdapat beberapa kabupaten/kota yang masih memperoleh opini WDP. BPK mengungkapkan 76% memperoleh WTP yaitu dari 411 LKPD, 21% memperoleh WDP dari 113 LKPD dan 3% memperoleh TMP dari 18 LKPD.

Pengawasan legislatif mempunyai peran penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang sebagai bentuk mekanisme internal. Mekanisme internal yang dilakukan lembaga internal untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas keputusan formal oleh pemerintah daerah. DPRD melakukan fungsi penganggaran, pengawasan serta legislasi sehingga dituntut melakukan fungsi pengawasan yang baik pada setiap kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah. Legislatif mempunyai *powerfull* yang menimbulkan tekanan terhadap eksekutif. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Arifin, Tower, dan Porter (2015) menyimpulkan dari penelitian (Sotiropoulos, 2008) menyatakan adanya potensi tekanan yang besar dari anggota parlemen sebagai pengaruh paksaan dari eksekutif pemerintah daerah untuk membuat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Luas wilayah berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah yang dihubungkan dengan teori Institusional dapat terlihat ketika pemerintah daerah

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan wilayah yang luas akan berbeda dengan wilayah yang lebih sempit (Widanti, 2019). Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang sempit akan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga wilayah yang sempit memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang bagus.

Kualitas pelatihan sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih agar dapat memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Pelatihan juga perlu dilakukan di luar kota atau luar daerah, hal ini perlu dilakukan sebagai penyegaran pola pikir pegawai juga untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang proses penyusunan laporan keuangan dengan membandingkan dengan daerah lain yang sudah maju dan berkualitas tinggi sehingga mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik (Muzahid, 2014).

Latar belakang atau tingkat pendidikan kepala daerah dan Indeks Pembangunan Manusia bisa juga memicu tidak mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD yang telah disajikan suatu pemerintah daerah karena bisa disebabkan tingkat pendidikan kepala daerah yang rendah dan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto et al (2010) yang menunjukkan *education background of the head of municipality* (latar belakang pendidikan kepala daerah) berpengaruh positif terhadap kesesuaian pengungkapan wajib pemerintah daerah.

Keberhasilan suatu aturan dapat diketahui dengan menelisik lebih jauh proses institusionalisasinya. Salah satu teori yang sering digunakan untuk mengungkapkan keberhasilan implementasi suatu program atau aturan dalam organisasi sektor publik adalah teori *New Institutional Sociology* (NIS) (Mariandini, Irianto, dan Nurkholis, 2018). Dalam praktiknya, proses institusionalisasi memungkinkan terjadinya perbedaan antara aturan formal dengan praktik yang sesungguhnya terjadi karena organisasi hanya melaksanakan aturan secara seremonial atau mempunyai tekanan untuk mendapatkan legitimasi/pengakuan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin, Tower, dan Porter (2015) melakukan penelitian menggunakan *institutional theory* yaitu menggunakan variabel *size of local government* sebagai *coercive isomorphism*, *jurisdiction (Java and non-Java)* sebagai *mimetic isomorphism*, dan *political influence* sebagai *normative isomorphism* terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan variabel independen yang sama akan tetapi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada pemerintah daerah/kota di Indonesia. Peneliti menggunakan variabel jumlah anggota DPRD dan luas wilayah sebagai pengujian teori *coercive isomorphism*. Variabel kualitas pelatihan sebagai pengujian teori *mimetic isomorphism*. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pendidikan Kepala Daerah sebagai pengujian teori *normative isomorphism*. Peneliti

mengambil judul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah pendidikan terakhir Kepala Daerah berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
3. Apakah kualitas pelatihan berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
4. Apakah jumlah anggota DPRD berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
5. Apakah Luas Wilayah berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui apakah indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD dan Luas wilayah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai pelaksana pemerintah sekaligus pembuat laporan keuangan daerah diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga

dapat mengevaluasi dan meningkatkan pemahaman serta kinerjanya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah agar berkualitas.

2. Bagi pemerintah pusat, sebagai tolak ukur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai isi skripsi dengan penjelasan yang komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang yang akan memunculkan permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II kajian pustaka ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi acuan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III metode penelitian yang menjelaskan tentang populasi sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV data dan pembahasan yang merupakan bagian pembahasan berisi tentang analisis deskriptif, analisis statistik serta pengujian hipotesis.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab V simpulan dan saran berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis bab sebelumnya serta saran yang digunakan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Yendrawati, 2013). Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut:

- 1). *Relevan*, informasi laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan tujuan operasional dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam melakukan pengambilan keputusan. Informasi yang relevan dapat digunakan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dan mengoreksi harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*), serta informasi harus disediakan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (*timeliness*).
- 2). *Reliable*, informasi yang disajikan secara wajar atau disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dikatakan *reliable* apabila: dapat diverifikasi, netral dan *representation faithfulness*.
- 3). *Comparability*, informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. *Understandibility*, informasi disajikan dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2 Teori Agensi

Menurut Govindarajan dan Anthony (2011) menjelaskan adanya hubungan agensi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agen*) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Pelaporan keuangan pada pemerintah daerah didasari oleh teori keagenan. Pemerintah daerah sebagai pihak agen yang menyajikan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*. Kemudian yang berperan sebagai prinsipal itu *stakeholder* yang berhak menilai akuntabilitas serta mengambil keputusan berdasarkan informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Teori agensi digunakan untuk mengupayakan pemahaman dan memecahkan masalah yang ada ketika informasi yang disajikan tidak lengkap. Hal ini yang bisa menjadi penyebab munculnya perbedaan informasi antara pemerintah dengan legislatif maupun publik (Gudono, 2017)

2.1.3 Teori Institusional

Institusionalisasi merupakan proses penciptaan realita dari hasil interaksi sosial antara para aktor dan tekanan lingkungan institusionalnya yang menghasilkan struktur formal/rutinitas/ kebiasaan baru. Scott (2008) menjelaskan cara dan karakter institusionalisasi disebut dengan *isomorphism* yang bisa bersifat (1) *coervive*, tekanan dari organisasi lain yang mempunyai dampak pengaruh yang kuat sehingga organisasi yang merespon mempunyai dampak ketergantungan yang besar, (2) *mimetic*, perubahan yang terjadi ketika organisasi melakukan pengimitasian dari praktik-praktik yang dilakukan oleh organisasi lain yang dinilai lebih berhasil, dan (3) *normative*, perubahan yang terjadi saat organisasi memutuskan untuk menggunakan standar organisasi profesi dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan internal organisasi.

Pemerintah sebagai legislatif atau DPRD mendapat tekanan dari organisasi lain untuk memiliki dampak pengaruh dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam teori institusional terdapat *coervive isomorphism* yaitu tekanan eksternal yang diberikan pemerintah, atau lembaga lain untuk merubah sistem sehingga menyebabkan adanya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Arifin, Tower, dan Porter, 2015) menyimpulkan dari penelitian (Sotiropoulos, 2008) menyatakan adanya potensi tekanan yang besar dari anggota parlemen sebagai pengaruh paksaan dari eksekutif pemerintah daerah untuk membuat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Luas wilayah yang menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini juga termasuk dalam *coervive*

isomorphism karena semakin luas wilayah semakin tinggi juga sarana prasarana yang harus disediakan pemerintah agar tersedinya pelayanan publik untuk melakukan penyusunan laporan keuangan agar berkualitas baik. Luas wilayah setiap daerah berbeda-beda sehingga tentunya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbeda. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang sempit akan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga wilayah yang sempit memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang bagus.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lebih bagus atau lebih berhasil perlu dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan tertentu. Perubahan yang di dapatkan oleh pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan pelatihan itu yang disebut pengimitasian atau *mimetic isomorphism* agar pemerintah daerah tersebut menjadi pemerintah daerah yang baik. Pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pelatihan juga perlu dilakukan di luar kota atau luar daerah, hal ini perlu dilakukan sebagai penyegaran pola pikir pegawai juga untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang proses penyusunan laporan keuangan dengan membandingkan dengan daerah lain yang sudah maju dan berkualitas tinggi sehingga mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik (Muzahid, 2014).

Berbeda dengan *normative isomorphism* yang merupakan bagian teori institusional terdapat hubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pendidikan Kepala Daerah. Indeks Pembangunan Manusia sebagai peran yang profesional dalam memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan. Secara nalar mengartikan peran Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pendidikan Kepala Daerah ini memberikan pengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Muzahid, 2014) menyatakan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Hanifah, 2017) menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.2

Tabel Penelitian Terdahulu

	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Mukhlisul (2014)	Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja	Analisis Deskriptif	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara parsial tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2	Antin (2015)	Ukuran Pemerintah, Jumlah SKPD,	Analisis Regresi	Hasil penelitian menunjukkan Ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah berpengaruh

		Jumlah DPRD, <i>Leverage</i> , Umur Administratif, Status Daerah, Belanja Daerah, dan <i>Intergovernmental revenue</i>	Berganda	negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan, <i>Intergorvenmental revenue</i> juga berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Belanja Daerah juga terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, Jumlah SKPD, Ukuran DPRD, <i>Leverage</i> , Umur pemda, Status daerah dan <i>Intergorvenmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.
3	Ariefsetya (2018)	Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintah	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Niken dan Sulardi (2018)	Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Temuan Audit, Opini Audit dan Pengungkapan Sukarela	Analisis Regresi linier berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa <i>Intergovernmental Revenue</i> (IR) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela di situs web pemerintah daerah. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia dan opini audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela di situs web pemerintah daerah, sementara temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela di situs web pemerintah daerah.
5	Vinne, Muchlis, dan Indah (2018)	Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Analisis Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan

				terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
6	Fika (2017)	Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, <i>Leverage</i>	analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model penelitian I indeks pembangunan manusia dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Hasil model penelitian II adalah indeks pembangunan manusia dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah.

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (2016) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu konsep pembangunan manusia yang dapat diukur dengan dimensi yang terdapat dalam suatu indeks komposit. Tiga dimensi yang mencakup IPM tersebut adalah *a long and healthy life* (umur panjang dan hidup sehat); *knowledge* (pengetahuan); *decent standard of living* (standar kehidupan layak).

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) juga mengharapkan adanya masyarakat yang tingkat pembangunannya baik juga. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2016) membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penelitian (Hanifah, 2017) menyatakan indeks

pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah artinya semakin tinggi indeks pembangunan manusia suatu daerah maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas secara lebih rinci.

2.2.2 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah sebutan untuk setiap daerah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah. Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan yang harus didukung oleh kegiatan yang kreatif, inovatif, serta komunikatif namun kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dipengaruhi dari tingkat pendidikan Kepala Daerah masing-masing daerah untuk mewujudkan peran dan kedudukan Kepala Daerah yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur sebutan untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati sebutan untuk Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan kemampuan Kepala Daerah dalam memimpin suatu pemerintahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan dan hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang secara efektif, efisien dan ekonomis.

2.2.3 Kualitas Pelatihan

Kegiatan pelatihan atau *training* perlu dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Definisi pelatihan menurut *Center for Development Management and Productivity* adalah belajar untuk mengubah tingkah laku seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus untuk membantu kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawannya dapat memberikan manfaat terhadap produktivitas, moral kerja serta stabilitas para karyawannya dalam mengerjakan pekerjaannya karena dampak dari pelatihan tersebut karyawan dapat dengan ahli dan trampil dalam menjalankan pekerjaannya untuk menyajikan informasi akuntansi yang andal dan relevan. Dengan demikian frekuensi pelatihan juga perlu ditingkatkan, guna menambah pengetahuan staf bagian akuntansi terhadap kekeliruan yang mungkin terjadi sehingga akan meningkatkan hasil yang optimal dalam penyajian informasi akuntansi.

2.2.4 Jumlah Anggota DPRD

Pemerintahan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai badan legislatif. DPRD juga sebagai wakil masyarakat mempunyai fungsi pengawasan, yaitu untuk mengontrol jalannya suatu pemerintahan agar tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi

pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah untuk terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

Anggota DPRD terdiri dari berbagai partai politik yang berdasarkan atas pemilihan umum. DPRD terdiri dari tiga wilayah administratif yaitu untuk tingkat provinsi yang disebut DPRD Provinsi, kabupaten disebut DPRD Kabupaten dan kota disebut DPRD Kota. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit berjumlah 20 dan paling banyak 45 orang.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 21 UU No. 15 tahun 2004, disebutkan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.5 Luas Wilayah

Menurut (Hardati, 2016) wilayah merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait, hal yang mendasarkan pada batasan ruang lingkup pengamatan tertentu, baik secara aspek pendekatan perencanaan maupun batasan administrasi. Luas wilayah dalam hal ini apakah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa luas wilayah merupakan variabel yang menggambarkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan

prasarana per satuan wilayah. Artinya semakin luas wilayah suatu pemerintahan daerah maka semakin banyak kebutuhan atas sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah agar dapat tersedianya pelayanan publik yang baik. Luas wilayah satu dengan luas wilayah daerah lainnya akan berdeda-beda, sehingga kualitas laporan keuangan setiap daerahnya akan berbeda. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang sempit akan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga wilayah yang sempit seharusnya memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang bagus.

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembangunan manusia atau kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan, seseorang yang berpendidikan tinggi akan dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dalam menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa dapat mengerti bagaimana kondisi dan hasil dari keuangan pemerintah daerah dan memberikan kesadaran terhadap informasi yang disajikan tidak ada tindakan manipulasi yang mengartikan kualitas laporan keuangan daerah tersebut bagus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2016) membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin tinggi IPM suatu daerah

maka akan semakin beragam tingkat keinginan masyarakat dalam tuntutan akan pemberian informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci dan lebih mudah dipahami agar mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang bagus. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Najah & Purwati, 2019) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD dan menyimpulkan bahwa semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah justru tidak diikuti tingginya level pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah, yang artinya menunjukkan kurangnya peran masyarakat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan yang memadai dan menyebabkan pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ = Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat pendidikan merupakan latar belakang yang telah dilalui oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pekerjaan (Muzahid, 2014). Jabatan yang diemban oleh seseorang mencerminkan tingkat tanggung jawabnya dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik (Budiono, Muchlis, dan Masri, 2018).

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan penjelasan tersebut, tingkat pendidikan kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi maupun ekonomi diharapkan lebih mudah memahami dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerahnya sendiri.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Muzahid, 2014) menyatakan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ = Tingkat Pendidikan kepada Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelatihan menurut *Center for Development Management and Productivity* adalah seseorang atau sekelompok organisasi belajar untuk mengubah tingkah laku seseorang atau sekelompok tersebut dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pada dasarnya pelatihan adalah proses memberikan bantuan untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan juga perlu dilakukan di luar kota atau luar daerah, hal ini perlu dilakukan sebagai penyegaran pola pikir pegawai juga untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang proses penyusunan laporan keuangan dengan membandingkan dengan daerah lain yang

sudah maju dan berkualitas tinggi sehingga mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik (Muzahid, 2014).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pendidikan, pembelajaran yang dilaksanakan dalam jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menghasilkan kompetensi individu atau sekelompok organisasi untuk menghadapi pekerjaan di dalam organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan akan berpengaruh positif karena telah membawa pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut bagus.

Hasil penelitian dari (Wungow, Lambe, dan Pontoh, 2016) membuktikan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin banyak pelatihan yang diikuti pegawai maka akan semakin terampil, berpengetahuan lebih dan berkualitas dalam pekerjaannya sehingga semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃ = Kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Jumlah anggota DPRD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sangat besar dalam mengawasi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran yang telah disediakan dapat digunakan secara baik.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk terciptanya keselarasan antara penyelenggara tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin tinggi jumlah anggota DPRD dapat diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam memaparkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Okfitasari, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syafitri (2012) membuktikan bahwa jumlah anggota DPRD atau jumlah legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. DPRD yang berperan mengawasi berjalannya keuangan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan transparan. Artinya penelitian tersebut juga memperlihatkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ = Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Pengaruh luas wilayah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Luas wilayah merupakan bagian suatu daerah atau wilayah yang dikuasai menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan dan dibatasi oleh batas batas kondisi fisik alam.

Luas wilayah berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah yang dihubungkan dengan teori Institusional dapat terlihat ketika pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan wilayah yang luas akan berbeda dengan wilayah yang lebih sempit (Widanti, 2019).

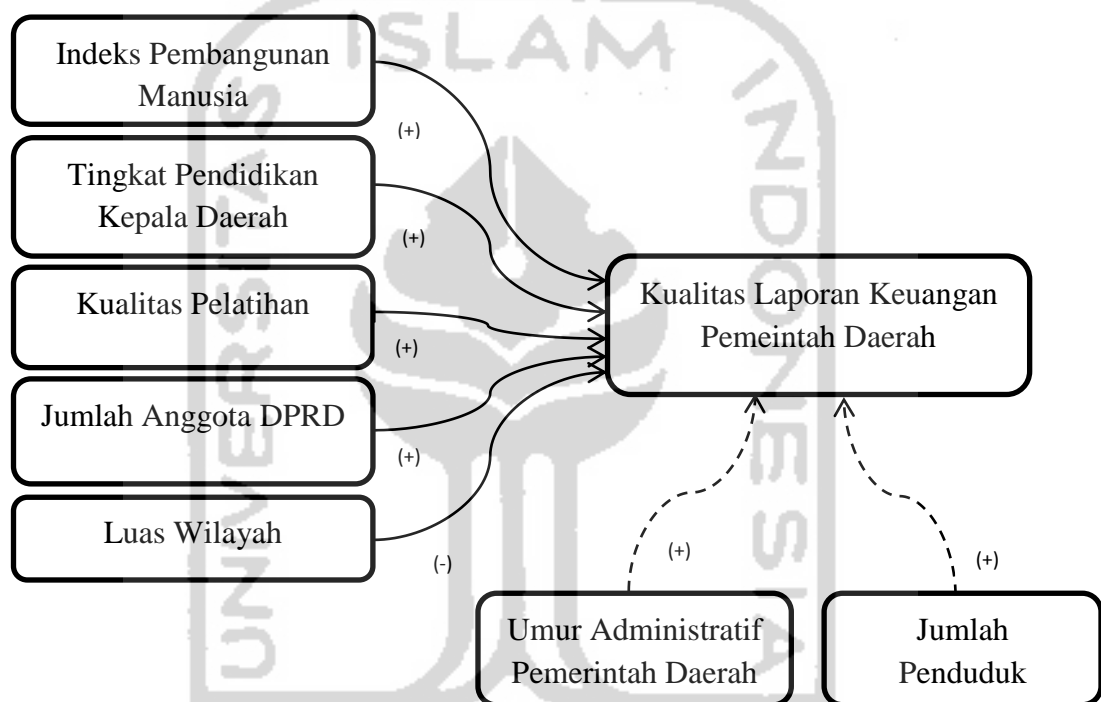
Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang sempit akan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga wilayah yang sempit memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang bagus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Tower, dan Porter (2015) membuktikan bahwa luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang digunakan peneliti adalah:

H₅ = Luas wilayah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan yang telah diuraikan

diatas yaitu latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka maka akan dikembangkan melalui kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian merupakan model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Total populasi 542 LKPD kabupaten/kota di Indonesia penelitian ini menggunakan sampel LKPD sebanyak 89 kabupaten/kota dari database Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia pada tahun 2017. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 yang diaudit oleh BPK RI. Pemilihan sampel dengan cara *purposive sampling*. Dengan kriteria pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki *website* resmi yang mudah diakses sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2017
2. *Website* resmi Kabupaten/Kota yang memiliki data:
 - a. Menyediakan hasil audit BPK terhadap LKPD
 - b. Menyediakan jumlah anggota DPRD tahun 2017 pada Daerah Dalam Angka (DDA).
 - c. Menyediakan data jumlah luas wilayah pada tahun 2017.
 - d. Menyediakan latar belakang atau profil Kepala Daerah pada tahun 2017.
 - e. Menyediakan data jumlah penduduk pada tahun 2017.

- f. Menyediakan data umur administratif pemerintah daerah yang diukur oleh Undang-Undang pembentukannya sampai pada tahun 2017.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mencocokkan dan mengambil data yang telah ditentukan dan dilihat melalui *website* resmi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota, beberapa data yang diperlukan oleh variabel independen dan melalui <http://keuda.kemendagri.go.id> dan www.bps.go.id kemudian diolah menggunakan SPSS.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel independen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X_1), tingkat pendidikan Kepala Daerah (X_2), kualitas pelatihan (X_3), jumlah anggota DPRD (X_4) dan luas wilayah (X_5). Variabel kontrol yaitu umur administratif pemerintah daerah (X_6) dan jumlah penduduk (X_7)

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah *Relevan, Reliable, Comparability*, dan *Understandibility*. Penelitian ini menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK terhadap LKPD kabupaten/kota dengan skala sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Opini BPK

Opini BPK	Skala
WTP	4
WDP	3
TW	2
TMP	1

3.2.2 Variabel Independen (X)

Indeks Pembangunan Manusia (X₁)

Pembangunan manusia atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengambilan data menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diambil melalui www.bps.go.id. Website tersebut menyediakan data IPM di tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia ini sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi. Tiga dimensi yang mencakup IPM tersebut adalah *long and healthy life* (umur panjang dan hidup sehat); *knowledge* (pengetahuan); *decent standard of living* (standar kehidupan layak).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Sulardi, 2018) menyatakan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam website Pemda secara berpengaruh positif dan signifikan dan

Penelitian (Hanifah, 2017) menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM suatu daerah maka akan semakin beragam tingkat keinginan masyarakat dalam tuntutan akan pemberian informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci dan lebih mudah dipahami agar mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang bagus

$$IPM = LN(\text{Indeks Pembangunan Manusia})$$

Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X₂)

Pendidikan merupakan suatu kemampuan seseorang yang dikembangkan dengan menempuh sekolah yang tinggi untuk mencapai dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka seseorang tersebut maka akan semakin kompleks ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki dan akan semakin baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Uraian diatas memberikan penjelasan bahwa kepala daerah yang semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan dapat mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia yang baik.

$$PENDIDIKAN = \text{Tingkat Pendidikan Kepala Daerah}$$

Tabel 3.2
Skala Tingakt Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat Pendidikan	Skala
SMA	1
Strata 1	2
Strata 2	3
Strata 3	4

Kualitas Pelatihan (X₃)

Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2013) menyatakan bahwa pelatihan harus dirancang agar mewujudkan cita-cita atau tujuan organisasi, yang pada saat bersamaan juga untuk mewujudkan tujuan-tujuan para pekerja secara perseorangan. Semakin banyak pelatihan yang diikuti oleh individu atau sekelompok organisasi maka kualitas penyajian informasi akuntansi yang disajikan juga akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan individu atau sekelompok organisasi yang tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan.

<i>PELATIHAN = Kualitas Pelatihan</i>

Jumlah Anggota DPRD (X₄)

Jumlah anggota DPRD digunakan untuk mengukur ukuran legislatif. Pasal 21 UU No. 15 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar kualitas laporan keuangan semakin baik karena itu termasuk permintaan lembaga

legislatif. Sehingga semakin tinggi jumlah anggota DPRD akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

$$DPRD = LN(\text{jumlah anggota DPRD})$$

Luas Wilayah (X₅)

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah memutuskan dalam ketentuan umum Pasal 1 yang menyatakan Luas wilayah atau daerah merupakan daerah otonom yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 luas wilayah adalah yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Dari uraian diatas dimaksudkan bahwa semakin luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin tinggi juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedianya pelayanan publik yang baik. Setiap daerah akan memiliki luas daerah yang berbeda sehingga dapat dilihat akan ada perbedaan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD juga berbeda. Akan tetapi daerah yang mempunyai luas wilayah yang luas akan sulit untuk dipantau atau dijangkau sehingga pada kenyataannya wilayah yang luas mendapatkan sarana dan prasarana tidak terpenuhi karena sulit dijangkau.

$$LUAS = LN(\text{Luas Wilayah})$$

3.2.3 Variabel Kontrol

Umur Pemerintahan Daerah

Umur administratif pemerintah daerah merupakan dari tahun awal berjalan suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah. Laporan keuangan yang kelengkapannya memiliki korelasi dengan umur pemerintahan daerah. Semakin lama umur pemerintah daerah maka kualitas laporan keuangan lebih baik karena sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

$$UMUR = LN (\text{Umur Administratif Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang})$$

Jumlah Penduduk

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012) menyatakan jumlah penduduk signifikan dan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan LKPD karena semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah makin tinggi juga wujud transparansi dan akuntabilitasnya.

$$PENDUDUK = LN (\text{Jumlah Penduduk})$$

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yaitu dari segi opini BPK terhadap LKPD kabupaten/kota di Indonesia, pembangunan manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, jumlah anggota DPRD dan luas wilayah. Variabel dependen dalam penelitian ini opini BPK terhadap

LKPD kabupaten/kota di Indonesia yang dapat diakses melalui *website* resmi milik Pemerintah Daerah atau <http://keuda.kemendagri.go.id>.

Variabel independen dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pendidikan kepala Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD dan luas wilayah yang diambil melalui www.bps.go.id dan *website* resmi Pemerintah Daerah masing-masing.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data yang terdiri dari perhitungan *mean*, *median*, *standar deviasi*, minimum dan maksimum yang akan digunakan untuk memberikan informasi yang berguna.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan statistik dalam analisis regresi berganda menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji: normalitas, multikolinieritas dan heterokedasitas. Tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan, tidak bias dan konsisten.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Sesuai dengan buku (Ghozali, 2016) penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Berdasarkan probabilitas $\geq 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal, dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji terhadap regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi disebut terdapat problem multikolinieritas karena model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, alat untuk menguji gangguan multikolinieritas yaitu dengan *Variance Inflation Factor (VIF)* (Ghozali, 2016)

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan *variance* yang berbeda dari pengamatan satu terhadap pengamatan lain. Cara selain mengetahui adanya atau tidak heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda atau sering disebut juga *multiple regression analysis* merupakan sebuah metode untuk menguji pengaruh dua atau lebih dari

dua variabel independen pada satu variabel dependen. Peneliti menggunakan persamaan regresi berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \epsilon_0$$

Keterangan :



Y	= Kualitas Laporan Keuangan
α	= Persamaan Regresi
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien Variabel Independen
X ₁	= Pembangunan Manusia
X ₂	= Tingkat pendidikan Kepala Daerah
X ₃	= Kualitas Pelatihan
X ₄	= Jumlah anggota DPRD
X ₅	= Luas Wilayah
X ₆	= Umur Administatif Pemerintah Daerah
X ₇	= Jumlah Penduduk
ϵ_0	= Error 1

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinan memiliki nilai nol dan satu sehingga semakin tinggi nilai koefisien determinan berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan dalam variabel dependen.

3.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji *t-test*. Uji *t-test* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% apabila t hitung $>0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dan apabila t hitung $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.



BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD, dan luas wilayah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan 89 hasil opini BPK yang sebagai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2017.

4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD, luas wilayah. Umur administratif pemerintah daerah dan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol serta opini BPK sebagai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
OPINI (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	89	3	4	3,8876	0,31760
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	89	47,95	85,49	71,1733	7,35136
PENDIDIKAN (Tingkat pendidikan Kepala Daerah)	89	1	4	2,7528	0,98027
PELATIHAN (Kualitas Pelatihan)	89	0	1	0,5056	0,50280
DPRD (Jumlah anggota DPRD)	89	20	50	36,0225	10,39993
LUAS (Luas Wilayah)	89	23	44071	3255,3072	6006,18228
UMUR (Umur Administratif Pemerintah Daerah)	89	5	72	45,8315	23,12527
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	89	11131,00	2827892,00	633141,6292	652606,07368

Hasil Data Diolah, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini BPK tahun 2017 yang sebagai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan opini yang diungkapkan oleh BPK melalui *website*

<http://keuda.kemendagri.go.id>. Opini BPK ini menggunakan skala ordinal 1 sampai 4. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di Tabel 4.1 di atas menunjukkan opini BPK tahun 2017 nilai minimum 3 dan nilai maksimum 4 dengan rata-rata 3,8876 standar deviasi 0,31760. Opini BPK tahun 2017 ini sebagai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang setiap tahunnya opini BPK terhadap LKPD meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 banyak Kabupaten/Kota yang mendapatkan WTP yang dalam skala penelitian ini skala 4 dan mulai sedikit yang mendapatkan WDP yang bersakala 3.

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan hasil dari IPM Kabupaten/Kota tersebut. Dalam uji ini IPM di ubah kedalam bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas maka dapat diketahui bahwa IPM mempunyai nilai minimum sebesar 47,95 nilai maksimum sebesar 85,49 dengan rata-rata nilai 71,1733 dan standar deviasi sebesar 7,35136. Nilai minimal sebesar 47,95 artinya Kabupaten/Kota yang memiliki IPM terkecil adalah Kabupaten Yahukimo dan pemerintah daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta dengan jumlah IPM sebesar 85,49.
3. Tingkat pendidikan Kepala Daerah menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan menjadi 1 sampai 4. Tabel 4.1 menjelaskan hasil uji statistik deskriptif yang diketahui bahwa angka minimum 1 dan maksimum 4. Angka minimum 1 merupakan ada beberapa Kabupaten/Kota yang Kepala Daerah tingkat pendidikan terakhir SMA

dan angka maksimum 4 merupakan ada beberapa Kabupaten/Kota yang Kepala Daerah tingkat pendidikan terakhir S3.

4. Kualitas pelatihan diukur dengan ada atau tidaknya pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota tersebut. Dalam uji ini Kabupaten/Kota yang melakukan pelatihan berskala 1 dan Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pelatihan bersekala 0. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang melakukan pelatihan dan yang tidak melakukan pelatihan.
5. Jumlah anggota DPRD diukur dengan jumlah anggota DPRD yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Jumlah anggota DPRD ini di ubah dalam bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Jumlah anggota DPRD yang memiliki nilai minimum sebesar 20 nilai maksimum 50 dengan rata-rata nilai 36,0225 dan standar deviasi sebesar 10,39993. Nilai minimum sebesar 20 artinya terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota DPRD terendah yaitu Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tomohon, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah Anggota DPRD 50 merupakan Kabupaten Palembang, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Makassar, Kabupaten Sleman.

6. Luas wilayah diukur menggunakan total luas wilayah dari Kabupaten/Kota tersebut. Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 diatas dapat diketahui luas wilayah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 3255,3072. Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah tersempit adalah Kota Padang Panjang 23 km² dan Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terluas adalah Kabupaten Marauke sebesar 44.071 km².

4.2 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan statistik dalam analisis regresi berganda menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji: normalitas, multikolinieritas dan heterokedasitas. Tujuannya untuk memberikan kapstian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan, tidak bias dan konsisten.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Sesuai dengan buku Ghozali (2016) penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrorov Smirnov*. Berdasarkan probabilitas $\geq 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal, dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,02796808
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,069
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,949
Asymp. Sig. (2-tailed)		,328

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,328, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. yang merupakan $\geq 0,05$, data yang diolah berdistribusi normal dan data yang digunakan layak untuk diolah.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikollinieritas digunakan untuk menguji terhadap regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi disebut terdapat problem multikolinieritas karena model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, alat untuk menguji gangguan multikolinieritas yaitu dengan *Variance Inflation Factor (VIF)* (Ghozali, 2016).

Tabel 4.3**Uji Multikolonieritas**

Hasil Data Diolah, 2020

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	,565	1,769	Tidak terjadi multikolonieritas
PENDIDIKAN (Tingkat pendidikan Kepala Daerah)	,839	1,193	Tidak terjadi multikolonieritas
PELATIHAN (Kualitas Pelatihan)	,959	1,042	Tidak terjadi multikolonieritas
DPRD (Jumlah Anggota DPRD)	,308	3,250	Tidak terjadi multikolonieritas
LUAS (Luas wilayah)	,689	1,452	Tidak terjadi multikolonieritas
UMUR (Umur Administratif Pemda)	,612	1,634	Tidak terjadi multikolonieritas
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	,320	3,127	Tidak terjadi multikolonieritas

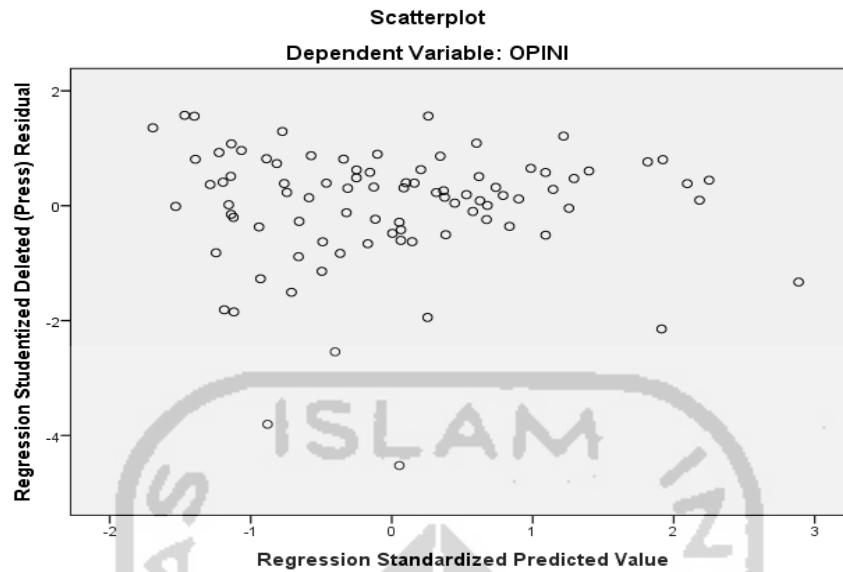
a. Dependent Variable: OPINI

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 untuk semua variabel. Dengan hasil nilai VIF

dari Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,769; tingkat pendidikan Kepala Daerah sebesar 1,193; kualitas pelatihan sebesar 1,042; jumlah anggota DPRD sebesar 3,250; luas wilayah sebesar 1,452; umur administratif pemerintah daerah sebesar 1,634 dan jumlah penduduk 3,127. Sedangkan untuk nilai *Tolerance* > 0,10 atau < 1 semua variabel dalam penelitian ini nilai *Tolerance* dari Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,565; tingkat pendidikan Kepala Daerah sebesar 0,839; kualitas pelatihan sebesar 0,959; jumlah anggota DPRD sebesar 0,308; luas wilayah sebesar 0,689; umur administratif pemerintah daerah sebesar 0,612; dan jumlah penduduk sebesar 0,320. Maka berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilakukan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan diagram *scatterplot*. Hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut:



Hasil Data Diolah, 2020

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas terlihat pola penyebaran data. pola yang menyebar tersebut tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas maka asumsi heterokedastisitas terpenuhi.

4.3 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Dalam melakukan analisis penelitian ini variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (X_1), tingkat pendidikan Kepala Daerah (X_2), kualitas pelatihan (X_3), jumlah anggota DPRD (X_4) dan luas wilayah (X_5). Variabel kontrol yaitu umur administratif pemerinth daerah (X_6) dan jumlah penduduk (X_7) terhadap opini BPK yang sebagai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) digunakan analisis regresi berganda.

Tabel 4.4
Analisis Regresi Berganda

Hasil Data Diolah, 2020

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,620	,166		-3,738	,000
IPM	,625	,088	,738	7,087	,000
PENDIDIKAN	-,001	,018	-,003	-,038	,969
PELATIHAN	,009	,006	,110	1,376	,173
DPRD	,010	,042	,033	,233	,817
LUAS	,015	,005	,308	3,261	,002
UMUR	,017	,013	,128	1,282	,203
PENDUDUK	-,007	,011	-,085	-,614	,541

a. Dependent Variable: OPINI

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (X_1) = 0,625; tingkat pendidikan Kepala Daerah (X_2) = -0,001; kualitas pelatihan (X_3) = 0,009; jumlah anggota DPRD (X_4) = 0,010; dan luas wilayah (X_5) = 0,015. Variabel kontrol yaitu umur administratif pemerinth daerah (X_6) = 0,017 dan jumlah penduduk (X_7) = -0,007 dengan konstanta sebesar -0,620 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = -0,620 + 0,625X_1 - 0,001X_2 + 0,009X_3 + 0,010X_4 + 0,015X_5 + 0,017X_6 - 0,007X_7 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan pengaruh variabel dependen (Y) atau opini BPK sebagai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diartikan koefisien regresi tersebut sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar $-0,620$ menyatakan bahwa, apabila variabel independen bernilai nol, maka nilai kualitas Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar $-0,620$.
2. Koefisien regresi IPM X_1 sebesar $0,625$ menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_1 akan meningkatkan Y sebesar $0,625$.
3. Koefisien regresi tingkat pendidikan Kepala Daerah X_2 sebesar $-0,001$ menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_2 akan menurunkan Y sebesar $0,001$.
4. Koefisien regresi kualitas pelatihan X_3 sebesar $0,009$ menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_3 akan meningkatkan Y sebesar $0,009$.
5. Koefisien regresi jumlah anggota DPRD X_4 sebesar $0,010$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai X_4 akan meningkatkan Y sebesar $0,010$.
6. Koefisien regresi luas wilayah X_5 sebesar $0,015$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai X_5 akan meningkatkan Y sebesar $0,015$.
7. Koefisien regresi umur administratif pemerintah daerah X_6 sebesar $0,017$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai X_6 akan meningkatkan Y sebesar $0,017$.
8. Koefisien regresi jumlah penduduk X_7 sebesar $0,007$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai X_7 akan meningkatkan Y sebesar $0,007$.

4.4 UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai prosentase kontribusi variabel independen IPM, tingkat pendidikan Kepala

Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD dan luas wilayah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.5

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,709 ^a	,503	,460	,02915

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,460, hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan Y dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 sebesar 46%. Sedangkan sisanya sebesar 54% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.5 UJI HIPOTESIS

4.5.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen baik secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan proram SPSS diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel:

1. Indeks Pembangunan Manusia (X_1) diperoleh hasil t hitung sebesar 7,087 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan

bahwa H_1 diterima artinya ada pengaruh positif Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Tingkat pendidikan Kepala Daerah (X_2) diperoleh hasil t hitung sebesar -0,038 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar $0,969 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak artinya tidak ada pengaruh positif tingkat pendidikan Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Kualitas pelatihan (X_3) diperoleh hasil t hitung sebesar 1,376 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar $0,173 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak artinya tidak ada pengaruh positif kualitas pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Jumlah anggota DPRD (X_4) diperoleh hasil t hitung sebesar 0,233 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar $0,817 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak artinya tidak ada pengaruh positif jumlah anggota DPRD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Luas wilayah (X_5) diperoleh hasil t hitung sebesar 3,261 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima artinya artinya ada pengaruh negatif tingkat pendidikan Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.6 PEMBAHASAN

Berdasarkan teori institusional dan teori agensi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan Kepala Daerah, kualitas pelatihan, jumlah anggota DPRD dan luas wilayah. Hasil pengujian di muka dapat dilihat berpengaruh atau tidak berpengaruhnya variabel Indeks Pembangunan Manusia (H_1), tingkat pendidikan Kepala Daerah (H_2), kualitas pelatihan (H_3), jumlah anggota DPRD (H_4) dan luas wilayah (H_5) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan di pembahasan berikut:

4.6.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM suatu daerah maka akan semakin beragam tingkat keinginan masyarakat dalam tuntutan akan pemberian informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci dan lebih mudah dipahami agar mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang bagus.

Dalam asumsi teori institusional peneliti memandang Indeks Pembangunan Manusia sebagai *normative isomorphism* karena sebagai peran yang profesional dalam memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan (Gudono, 2017). Secara nalar mengartikan peran Indeks Pembangunan

Manusia sebagai profesionalisasi yang akan memaksa menjadi ‘sama’ dalam memperjuangkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan pengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bagus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Wulandari dan Sulardi (2018) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memengaruhi pengungkapan sukarela dalam *website* Pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya sama halnya dengan yang dilakukan peneliti saat ini yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih berkualitas.

4.6.2 Pengaruh tingkat pendidikan Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dibuktikan bahwa tingkat pendidikan Kepala Daerah tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan

Kepala Daerah akan dapat lebih bagus dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan daerah namun dalam penelitian ini tingkat pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam asumsi teori institusional, tingkat pendidikan Kepala Daerah menurut peneliti termasuk *normative isomorphism* karena tingkat pendidikan Kepala Daerah sebagai peran yang profesional dalam memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan. Secara nalar mengartikan peran Kepala Daerah ini memberikan pengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi mudah dapat mengetahui dan memahami penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Namun dalam penelitian ini diungkapkan bahwa tingkat pendidikan Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya Kepala Daerah yang berpendidikan tinggi mungkin saja bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi sehingga kurang memahami penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian hal ini kemungkinan dapat menjadi alasan tingkat pendidikan Kepala Daerah tidak terbukti dapat memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh Budiono, Muchlis, dan Masri (2018) membuktikan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan tidak semua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, bisa dan paham dalam menyelesaikan masalah laporan keuangan daerah.

4.6.3 Pengaruh kualitas pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini kemungkinan dikarenakan tidak semua daerah yaitu Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan memahami dalam menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah, serta program pelatihan yang diberikan tidak selalu dapat memperbaiki kinerja yang buruk terhadap pegawai.

Kegiatan pelatihan dengan cara meminta dilakukannya bimbingan teknis (Bimtek) oleh suatu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah yang lebih bagus kualitas manajemen dan pelaporan keuangannya perlu dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan tertentu. Perubahan yang di dapatkan oleh pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan pelatihan itu menurut peneliti diklasifikasikan sebagai tindakan *mimetic isomorphism* (kekuatan meniru) agar pemerintah daerah tersebut menjadi pemerintah daerah yang baik. Pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam penelitian ini kualitas pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan materi pelatihan yang selama ini diberikan untuk peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan belum efektif atau kemungkinan lain perlu dilakukan metode atau cara pelatihan yang lebih

efektif karena latar belakang peserta pelatihan dimungkinkan berbeda-beda bidangnya.

4.6.4 Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat membuktikan bahwa jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemungkinan tidak berpengaruhnya variabel jumlah anggota DPRD ini karena keberadaan anggota DPRD di daerah tersebut tidak dapat menekan untuk menaikkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan saat ini pemilihan anggota DPRD menggunakan mekanisme PILKADA, sehingga rakyat memilih langsung kepala daerahnya. Jadi saat ini kepala daerah tidak dipilih oleh DPRD seperti pada jaman dahulu. Hal ini menyebabkan peran DPRD terhadap pengendalian kualitas laporan keuangan juga semakin berkurang.

DPRD sebagai wakil masyarakat mempunyai fungsi pengawasan, yaitu untuk mengontrol jalannya suatu pemerintahan agar tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah untuk terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Hal ini menunjukkan DPRD mendapat tekanan dari organisasi lain untuk memiliki dampak pengaruh dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam teori institusional terdapat *coercive isomorphism* yaitu tekanan eksternal yang diberikan pemerintah, atau lembaga lain untuk merubah sistem

sehingga menyebabkan adanya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa DPRD yang sebagai *coercive isomorphism* lemah untuk memahami makna pentingnya laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Okfitasari (2015) membuktikan bahwa Ukuran DPRD tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

4.6.5 Pengaruh luas wilayah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat membuktikan bahwa luas wilayah berpengaruh negatif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah yang luas dan penduduknya sama dengan daerah yang mempunyai wilayah yang sempit memiliki dampak yang berbeda dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang sempit akan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga wilayah yang sempit cenderung memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang lebih baik. Kebutuhan komunikasi dan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila pemerintah daerah bertanggung jawab atas kelengkapan dalam menjalankan suatu tugas. Sehingga apabila terdapat keadaan yang saling bergantung diantara setiap kegiatan maka hasil yang efektif akan tercapai.

Pemerintah Daerah yang mempunyai luas wilayah yang besar akan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah tersebut agar komunikasi dan koordinasi antar daerah dapat dilakukan dengan lancar. Pemerintah Daerah juga bisa dengan melakukan pemekaran daerah sehingga pemerintah daerah yang luas tersebut dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi antar instansi di daerah tersebut dan hal ini akan memicu pemerintah daerah mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Meskipun daerah tersebut sudah mempunyai infrastruktur yang baik namun pertemuan fisik yang dilakukan dengan tujuan komunikasi dan koordinasi antar daerah juga sangat diperlukan.

Luas wilayah yang menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini juga termasuk dalam *coercive isomorphism* karena semakin luas wilayah semakin tinggi juga sarana prasarana yang harus disediakan pemerintah agar tersedianya pelayanan publik untuk melakukan penyusunan laporan keuangan agar berkualitas baik akan tetapi pemerintah daerah yang sempit terbukti lebih berkualitas karena mudah dijangkau dan terpenuhi sarana prasarananya. Pemerintah Daerah hendaknya secara terus menerus meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Tower, dan Porter (2015) membuktikan bahwa luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya sama halnya dengan

penelitian ini hanya berbeda variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tetapi dapat membuktikan luas wilayah berpengaruh negatif dan terbukti wilayah yang luas akan lebih membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang lebih tinggi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka akan semakin beragam tingkat keinginan masyarakat dalam tuntutan akan pemberian informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci dan lebih mudah dipahami agar mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan Kepala Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Daerah akan dapat lebih bagus dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan daerah namun dalam penelitian ini tingkat pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan tidak semua Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan agar memahami dalam menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah dan program pelatihan

yang diberikan lembaga tidak selalu dapat memperbaiki kinerja yang buruk terhadap pegawai.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemungkinan tidak berpengaruh positif karena jumlah anggota DPRD di daerah tersebut tidak dapat menekan atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disebabkan karena saat ini pemilihan anggota DPRD menggunakan mekanisme PILKADA, sehingga rakyat memilih langsung kepala daerahnya. Jadi kepala daerah bukan dipilih oleh DPRD seperti dahulu. Hal ini menyebabkan peran DPRD terhadap pengendalian kualitas laporan keuangan juga semakin berkurang.
5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang sempit akan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga wilayah yang sempit cenderung memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang lebih baik.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan tingkat pendidikan Kepala Daerah agar laporan keuangan yang

dihasilkan semakin berkualitas. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan prinsip dalam penerapan *good government* dan pengawasan oleh anggota DPRD untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah lebih berkualitas.

2. Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat membantu pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lagi penelitian, mengingat bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 46% saja atas variabel dependen selain itu, penelitian selanjutnya perlu menambah misalnya dengan mencoba menambah indikator atau variabel independen lain yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Anthony, Robert N. & Vijay Govindarajan. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku 1. Edisi 11 (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2015). *Financial Reporting Compliance In Indonesian Local Governments: Mimetic Pressure Dominates*. JAAI 19(1): 68-84.
- Brata, A. G. (2002). *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 7 (2): 113-122. doi: [10.20885/ejem.v7i2.645](https://doi.org/10.20885/ejem.v7i2.645).
- Budiono, V. S., Muchlis, & Masri, I. (2018). *Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Wahana Akuntansi 13 (2): 110-128. doi: [10.21009/wahana-akuntansi/13.2.02](https://doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.02).
- Darmawan, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Dodopo, Y., Sondakh, J. J., & Tinangon, J. J. (2017). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara*. Universitas Sam Ratuangi 8 (1). doi: [10.35800/jjs.v8i1.15306](https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15306).
- Evira, C. Y., Islahuddin, & Darwanis. (2014). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1 (2): 1-14.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanifah, F. F. (2017). *Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, dan Leverage terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah pada Website Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang, Skripsi.

- Hardati, P. (2016). *Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*. Jurnal Geografi 16 (2): 205-224.
- Mariandini, F. I., Irianto, G., & Nurkholis. (2018). *Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Pemerintah Kota Malang*. Jurnal Economia. doi:10.21831/economia.v14i1.15418.
- Matusaka, J. G. (2001). *Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence From State and Local Governments in the First Half of the 20th Century*. National Tax Journal 54 (1): 57-82. doi:10.17310/ntj.2001.1.03.
- Muzahid, M. (2014). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Akuntansi 2 (2): 179-196.
- Najah, U., & Purwati, A. S. (2019). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kualitas Hasil Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD*. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah 4 (2): 70-88.
- Nastiti, A. D. (2013). *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Kota Magelang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro.
- Okfitasari, A. (2015). *Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta 2 (4).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy*. Jurnal Nominal 6 (2). doi: 10.21831/nominal.v6i2.16643.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 9 (2): 154-170.
- Setyowati, L. (2016). *Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Bisnis dan Manajemen 6 (1): 45-62. doi:10.15408/ess.v6i1.3120.
- Suhardjanto, D., & Yiulianingtyas, R. R. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Penungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi & Auditing 8 (1): 30-42.

- Widanti, R. Y. (2019). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Wulandari, N. A., & Sulardi. (2018). *Pengaruh Karakteristik Daerah, Temuan, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela*. *Akuntansi Dewantara* (1). doi:10.29230/ad.v2i1.2477.
- Wungow, J. F., Lambe, L., & Pontoh, W. (2016). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Ekonomi* 7 (2): 184-186. doi:10.35800/jjs.v7i2.13560.
- Yendrawati, R. (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating*. *JAAI* 17 (2): 166-175.
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3 (2): 206-220.



LAMPIRAN 1

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Kabupaten/Kota	OPINI
1	Kota Banda Aceh	4
2	Kota Sabang	4
3	Kabupaten Aceh Jaya	4
4	Kabupaten Aceh Utara	4
5	Kabupaten Aceh Singkil	4
6	Kota Langsa	4
7	Kabupaten Nias	3
8	Kota Binjai	4
9	Kota Pematang Siantar	4
10	Kota Solok	4
11	Kota Bukittinggi	4
12	Kota Padang	4
13	Kota Padang Panjang	4
14	Kota Payakumbuh	4
15	Kabupaten Muara Enim	4
16	Kota Lubuk Linggau	4
17	Kabupaten Lahat	4
18	Kota Palembang	4
19	Kota Jambi	4
20	Kabupaten Merangin	4
21	Kota Bekasi	4
22	Kota Depok	4
23	Kota Serang	4
24	Kota Tangerang	4
25	Kabupaten Brebes	3
26	Kabupaten Cilacap	4
27	Kabupaten Purworejo	4
28	Kabupaten Wonosobo	4
29	Kota Magelang	4
30	Kota Pekalongan	4
31	Kota Salatiga	4
32	Kota Semarang	4
33	Kota Surakarta	4
34	Kabupaten Bandung Barat	3
35	Kabupaten Cianjur	4
36	Kabupaten Purwakarta	4
37	Kabupaten Sukabumi	4

38	Kota Surabaya	4
39	Kabupaten Sidoarjo	4
40	Kabupaten Gresik	4
41	Kota Madiun	4
42	Kota Kediri	4
43	Kota Blitar	4
44	Kota Malang	4
45	Kota Makassar	4
46	Kabupaten Sinjai	4
47	Kabupaten Bone	4
48	Kota Pare-pare	4
49	Kota Ternate	4
50	Kota Tidore Kepulauan	4
51	Kabupaten Kepulauan Sula	3
52	Kabupaten Pulau Taliabu	3
53	Kabupaten Bantul	4
54	Kabupaten Kulon Progo	4
55	Kota Yogyakarta	4
56	Kabupaten Sleman	4
57	Kota Mataram	4
58	kabupaten Lombok Timur	4
59	Kabupaten Alor	3
60	Kota Kupang	3
61	Kabupaten Mempawah	4
62	Kota Pontianak	4
63	Kota Singkawang	4
64	Kota Palangkaraya	4
65	kabupaten Kapuas	4
66	kabupaten Barito Timur	4
67	kabupaten Banjar	4
68	Kota Balikpapan	4
69	Kota Bontang	4
70	Kota Samarinda	4
71	Kota Nunukan	4
72	Kota Manado	4
73	Kota Tomohon	4
74	Kabupaten Marauke	4
75	Kota Jayapura	4
76	kabupaten Fakfak	4
77	kabupaten Raja Ampat	4
78	Kabupaten Bangli	4

79	Kabupaten Landak	4
80	Kabupaten Paniai	3
81	Kabupaten Yahukimo	3
82	Kabupaten Deiyai	3
83	Kabupaten Seruyan	4
84	Kabupaten Tapin	4
85	Kabupaten Paser	4
86	Kabupaten Bitung	4
87	Kabupaten Kampar	4
88	Kabupaten Kerinci	4
89	Kabupaten Sarolangun	4



LAMPIRAN 2

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

No.	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Banda Aceh	83,95
2	Kota Sabang	74,1
3	Kabupaten Aceh Jaya	68,07
4	Kabupaten Aceh Utara	67,67
5	Kabupaten Aceh Singkil	67,37
6	Kota Langsa	75,89
7	Kabupaten Nias	60,21
8	Kota Binjai	74,65
9	Kota Pematang Siantar	77,54
10	Kota Solok	67,86
11	Kota Bukittinggi	79,8
12	Kota Padang	81,58
13	Kota Padang Panjang	77,01
14	Kota Payakumbuh	77,91
15	Kabupaten Muara Enim	67,63
16	Kota Lubuk Linggau	73,67
17	Kabupaten Lahat	66,38
18	Kota Palembang	77,22
19	Kota Jambi	76,74
20	Kabupaten Merangin	68,3
21	Kota Bekasi	72,63
22	Kota Depok	79,83
23	Kota Serang	65,6
24	Kota Tangerang	77,01
25	Kabupaten Brebes	64,86
26	Kabupaten Cilacap	68,9
27	Kabupaten Purworejo	71,31
28	Kabupaten Wonosobo	66,89
29	Kota Magelang	68,39
30	Kota Pekalongan	73,77
31	Kota Salatiga	81,68
32	Kota Semarang	73,2
33	Kota Surakarta	80,85
34	Kabupaten Bandung Barat	66,63
35	Kabupaten Cianjur	63,7
36	Kabupaten Purwakarta	69,28
37	Kabupaten Sukabumi	65,49

38	Kota Surabaya	81,07
39	Kabupaten Sidoarjo	78,7
40	Kabupaten Gresik	74,84
41	Kota Madiun	70,27
42	Kota Kediri	70,47
43	Kota Blitar	69,33
44	Kota Malang	68,47
45	Kota Makassar	81,13
46	Kabupaten Sinjai	65,8
47	Kabupaten Bone	64,16
48	Kota Pare-pare	76,68
49	Kota Ternate	78,48
50	Kota Tidore Kepulauan	69,25
51	Kabupaten Kepulauan Sula	62,04
52	Kabupaten Pulau Taliabu	59,03
53	Kabupaten Bantul	78,67
54	Kabupaten Kulon Progo	73,23
55	Kota Yogyakarta	85,49
56	Kabupaten Sleman	82,85
57	Kota Mataram	77,84
58	kabupaten Lombok Timur	64,37
59	Kabupaten Alor	59,61
60	Kota Kupang	62,79
61	Kabupaten Mempawah	64
62	Kota Pontianak	77,93
63	Kota Singkawang	70,25
64	Kota Palangkaraya	79,69
65	Kabupaten Kapuas	68,04
66	Kabupaten Barito Timur	70,57
67	Kabupaten Banjar	67,77
68	Kota Balikpapan	79,01
69	Kota Bontang	79,47
70	Kota Samarinda	79,46
71	Kota Nunukan	65,1
72	Kota Manado	78,05
73	Kota Tomohon	75,34
74	Kabupaten Marauke	68,64
75	Kota Jayapura	79,23
76	Kabupaten Fakfak	66,09
77	Kabupaten Raja Ampat	62,35
78	Kabupaten Bangli	68,24

79	Kabupaten Landak	64,93
80	Kabupaten Paniai	54,91
81	Kabupaten Yahukimo	47,95
82	Kabupaten Deiyai	49,07
83	Kabupaten Seruyan	66,14
84	Kabupaten Tapin	68,7
85	Kabupaten Paser	71,16
86	Kabupaten Bitung	72,94
87	Kabupaten Kampar	72,19
88	Kabupaten Kerinci	70,03
89	Kabupaten Sarolangun	69,03



LAMPIRAN 3

TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH

No.	Kabupaten/Kota	PENDIDIKAN
1	Kota Banda Aceh	3
2	Kota Sabang	1
3	Kabupaten Aceh Jaya	3
4	Kabupaten Aceh Utara	1
5	Kabupaten Aceh Singkil	1
6	Kota Langsa	2
7	Kabupaten Nias	4
8	Kota Binjai	3
9	Kota Pematang Siantar	3
10	Kota Solok	3
11	Kota Bukittinggi	2
12	Kota Padang	2
13	Kota Padang Panjang	2
14	Kota Payakumbuh	3
15	Kabupaten Muara Enim	3
16	Kota Lubuk Linggau	4
17	Kabupaten Lahat	3
18	Kota Palembang	2
19	Kota Jambi	4
20	Kabupaten Merangin	4
21	Kota Bekasi	4
22	Kota Depok	3
23	Kota Serang	2
24	Kota Tangerang	3
25	Kabupaten Brebes	2
26	Kabupaten Cilacap	1
27	Kabupaten Purworejo	3
28	Kabupaten Wonosobo	3
29	Kota Magelang	2
30	Kota Pekalongan	2
31	Kota Salatiga	3
32	Kota Semarang	3
33	Kota Surakarta	3
34	Kabupaten Bandung Barat	3
35	Kabupaten Cianjur	4
36	Kabupaten Purwakarta	2
37	Kabupaten Sukabumi	3

38	Kota Surabaya	4
39	Kabupaten Sidoarjo	3
40	Kabupaten Gresik	4
41	Kota Madiun	2
42	Kota Kediri	2
43	Kota Blitar	3
44	Kota Malang	4
45	Kota Makassar	4
46	Kabupaten Sinjai	2
47	Kabupaten Bone	3
48	Kota Pare-Pare	4
49	Kota Ternate	4
50	Kota Tidore Kepulauan	1
51	Kabupaten Kepulauan Sula	1
52	Kabupaten Pulau Taliabu	1
53	Kabupaten Bantul	4
54	Kabupaten Kulon Progo	4
55	Kota Yogyakarta	4
56	Kabupaten Sleman	4
57	Kota Mataram	1
58	Kabupaten Lombok Timur	4
59	Kabupaten Alor	3
60	Kota Kupang	4
61	Kabupaten Mempawah	4
62	Kota Pontianak	3
63	Kota Singkawang	2
64	Kota Palangkaraya	2
65	Kabupaten Kapuas	3
66	Kabupaten Barito Timur	2
67	Kabupaten Banjar	1
68	Kota Balikpapan	2
69	Kota Bontang	4
70	Kota Samarinda	3
71	Kota Nunukan	2
72	Kota Manado	4
73	Kota Tomohon	2
74	Kabupaten Marauke	2
75	Kota Jayapura	3
76	Kabupaten Fakfak	1
77	Kabupaten Raja Ampat	2
78	Kabupaten Bangli	3

79	Kabupaten Landak	3
80	Kabupaten Paniai	2
81	Kabupaten Yahukimo	2
82	Kabupaten Deiyai	2
83	Kabupaten Seruyan	3
84	Kabupaten Tapin	4
85	Kabupaten Paser	4
86	Kabupaten Bitung	2
87	Kabupaten Kampar	3
88	Kabupaten Kerinci	4
89	Kabupaten Sarolangun	2



LAMPIRAN 4

KUALITAS PELATIHAN

No.	Kabupaten/Kota	PELATIHAN
1	Kota Banda Aceh	1
2	Kota Sabang	1
3	Kabupaten Aceh Jaya	1
4	Kabupaten Aceh Utara	1
5	Kabupaten Aceh Singkil	1
6	Kota Langsa	1
7	Kabupaten Nias	0
8	Kota Binjai	1
9	Kota Pematang Siantar	0
10	Kota Solok	1
11	Kota Bukittinggi	0
12	Kota Padang	0
13	Kota Padang Panjang	0
14	Kota Payakumbuh	1
15	Kabupaten Muara Enim	1
16	Kota Lubuk Linggau	0
17	Kabupaten Lahat	0
18	Kota Palembang	1
19	Kota Jambi	1
20	Kabupaten Merangin	0
21	Kota Bekasi	1
22	Kota Depok	0
23	Kota Serang	0
24	Kota Tangerang	0
25	Kabupaten Brebes	0
26	Kabupaten Cilacap	1
27	Kabupaten Purworejo	1
28	Kabupaten Wonosobo	0
29	Kota Magelang	1
30	Kota Pekalongan	0
31	Kota Salatiga	0
32	Kota Semarang	1
33	Kota Surakarta	1
34	Kabupaten Bandung Barat	0
35	Kabupaten Cianjur	0
36	Kabupaten Purwakarta	0
37	Kabupaten Sukabumi	0

38	Kota Surabaya	1
39	Kabupaten Sidoarjo	0
40	Kabupaten Gresik	0
41	Kota Madiun	0
42	Kota Kediri	1
43	Kota Blitar	0
44	Kota Malang	1
45	Kota Makassar	1
46	Kabupaten Sinjai	1
47	Kabupaten Bone	1
48	Kota Pare-Pare	0
49	Kota Ternate	1
50	Kota Tidore Kepulauan	0
51	Kabupaten Kepulauan Sula	0
52	Kabupaten Pulau Taliabu	0
53	Kabupaten Bantul	0
54	Kabupaten Kulon Progo	1
55	Kota Yogyakarta	0
56	Kabupaten Sleman	1
57	Kota Mataram	0
58	Kabupaten Lombok Timur	1
59	Kabupaten Alor	0
60	Kota Kupang	1
61	Kabupaten Mempawah	0
62	Kota Pontianak	1
63	Kota Singkawang	1
64	Kota Palangkaraya	1
65	Kabupaten Kapuas	1
66	Kabupaten Barito Timur	0
67	Kabupaten Banjar	1
68	Kota Balikpapan	1
69	Kota Bontang	1
70	Kota Samarinda	1
71	Kota Nunukan	1
72	Kota Manado	0
73	Kota Tomohon	0
74	Kabupaten Marauke	1
75	Kota Jayapura	1
76	Kabupaten Fakfak	0
77	Kabupaten Raja Ampat	0
78	Kabupaten Bangli	0

79	Kabupaten Landak	0
80	Kabupaten Paniai	0
81	Kabupaten Yahukimo	0
82	Kabupaten Deiyai	1
83	Kabupaten Seruyan	0
84	Kabupaten Tapin	1
85	Kabupaten Paser	1
86	Kabupaten Bitung	0
87	Kabupaten Kampar	0
88	Kabupaten Kerinci	1
89	Kabupaten Sarolangun	1



LAMPIRAN 5

JUMLAH ANGGOTA DPRD

No.	Kabupaten/Kota	DPRD
1	Kota Banda Aceh	30
2	Kota Sabang	20
3	Kabupaten Aceh Jaya	20
4	Kabupaten Aceh Utara	45
5	Kabupaten Aceh Singkil	25
6	Kota Langsa	25
7	Kabupaten Nias	25
8	Kota Binjai	30
9	Kota Pematang Siantar	30
10	Kota Solok	35
11	Kota Bukittinggi	25
12	Kota Padang	45
13	Kota Padang Panjang	20
14	Kota Payakumbuh	25
15	Kabupaten Muara Enim	45
16	Kota Lubuk Linggau	30
17	Kabupaten Lahat	40
18	Kota Palembang	50
19	Kota Jambi	45
20	Kabupaten Merangin	35
21	Kota Bekasi	50
22	Kota Depok	25
23	Kota Serang	45
24	Kota Tangerang	50
25	Kabupaten Brebes	50
26	Kabupaten Cilacap	50
27	Kabupaten Purworejo	45
28	Kabupaten Wonosobo	41
29	Kota Magelang	25
30	Kota Pekalongan	35
31	Kota Salatiga	25
32	Kota Semarang	50
33	Kota Surakarta	45
34	Kabupaten Bandung Barat	50
35	Kabupaten Cianjur	50
36	Kabupaten Purwakarta	45
37	Kabupaten Sukabumi	50

38	Kota Surabaya	50
39	Kabupaten Sidoarjo	50
40	Kabupaten Gresik	50
41	Kota Madiun	45
42	Kota Kediri	50
43	Kota Blitar	50
44	Kota Malang	45
45	Kota Makassar	50
46	Kabupaten Sinjai	30
47	Kabupaten Bone	45
48	Kota Pare-Pare	25
49	Kota Ternate	30
50	Kota Tidore Kepulauan	25
51	Kabupaten Kepulauan Sula	25
52	Kabupaten Pulau Taliabu	20
53	Kabupaten Bantul	45
54	Kabupaten Kulon Progo	40
55	Kota Yogyakarta	30
56	Kabupaten Sleman	50
57	Kota Mataram	40
58	Kabupaten Lombok Timur	50
59	Kabupaten Alor	30
60	Kota Kupang	35
61	Kabupaten Mempawah	30
62	Kota Pontianak	45
63	Kota Singkawang	30
64	Kota Palangkaraya	30
65	Kabupaten Kapuas	40
66	Kabupaten Barito Timur	25
67	Kabupaten Banjar	45
68	Kota Balikpapan	45
69	Kota Bontang	25
70	Kota Samarinda	45
71	Kota Nunukan	25
72	Kota Manado	40
73	Kota Tomohon	20
74	Kabupaten Marauke	30
75	Kota Jayapura	40
76	Kabupaten Fakfak	20
77	Kabupaten Raja Ampat	20
78	Kabupaten Bangli	30

79	Kabupaten Landak	35
80	Kabupaten Paniai	25
81	Kabupaten Yahukimo	35
82	Kabupaten Deiyai	20
83	Kabupaten Seruyan	25
84	Kabupaten Tapin	25
85	Kabupaten Paser	30
86	Kabupaten Bitung	30
87	Kabupaten Kampar	45
88	Kabupaten Kerinci	30
89	Kabupaten Sarolangun	35



LAMPIRAN 6

LUAS WILAYAH

No.	Kabupaten/Kota	LUAS
1	Kota Banda Aceh	61,36
2	Kota Sabang	153
3	Kabupaten Aceh Jaya	3812,99
4	Kabupaten Aceh Utara	3236,86
5	Kabupaten Aceh Singkil	2185
6	Kota Langsa	262,41
7	Kabupaten Nias	1842,51
8	Kota Binjai	90,45
9	Kota Pematang Siantar	7997
10	Kota Solok	57,64
11	Kota Bukittinggi	25,24
12	Kota Padang	693,66
13	Kota Padang Panjang	23
14	Kota Payakumbuh	80,43
15	Kabupaten Muara Enim	7383,9
16	Kota Lubuk Linggau	401,5
17	Kabupaten Lahat	5311,74
18	Kota Palembang	400,61
19	Kota Jambi	205,38
20	Kabupaten Merangin	7668,61
21	Kota Bekasi	206,61
22	Kota Depok	200,29
23	Kota Serang	266,71
24	Kota Tangerang	153,93
25	Kabupaten Brebes	1902,37
26	Kabupaten Cilacap	2385
27	Kabupaten Purworejo	1034
28	Kabupaten Wonosobo	984,68
29	Kota Magelang	1085
30	Kota Pekalongan	45,25
31	Kota Salatiga	56,78
32	Kota Semarang	392
33	Kota Surakarta	44,03
34	Kabupaten Bandung Barat	1311,31
35	Kabupaten Cianjur	3840,16
36	Kabupaten Purwakarta	971,72
37	Kabupaten Sukabumi	4161

38	Kota Surabaya	350,54
39	Kabupaten Sidoarjo	634,38
40	Kabupaten Gresik	1191,25
41	Kota Madiun	1137
42	Kota Kediri	1552
43	Kota Blitar	1588,79
44	Kota Malang	145,28
45	Kota Makassar	175,77
46	Kabupaten Sinjai	819,96
47	Kabupaten Bone	4559
48	Kota Pare-Pare	99,33
49	Kota Ternate	111,39
50	Kota Tidore Kepulauan	1645,73
51	Kabupaten Kepulauan Sula	3304,32
52	Kabupaten Pulau Taliabu	15078,05
53	Kabupaten Bantul	506,85
54	Kabupaten Kulon Progo	586,27
55	Kota Yogyakarta	32,5
56	Kabupaten Sleman	574,82
57	Kota Mataram	61,3
58	Kabupaten Lombok Timur	1230,76
59	Kabupaten Alor	286,6
60	Kota Kupang	26,18
61	Kabupaten Mempawah	2797,88
62	Kota Pontianak	107,8
63	Kota Singkawang	504
64	Kota Palangkaraya	2399,5
65	Kabupaten Kapuas	14999
66	Kabupaten Barito Timur	3834
67	Kabupaten Banjar	4688
68	Kota Balikpapan	527
69	Kota Bontang	406,7
70	Kota Samarinda	783
71	Kota Nunukan	13841
72	Kota Manado	157,27
73	Kota Tomohon	114,2
74	Kabupaten Marauke	44071
75	Kota Jayapura	935,92
76	Kabupaten Fakfak	14320
77	Kabupaten Raja Ampat	8034,44
78	Kabupaten Bangli	490,71

79	Kabupaten Landak	9909
80	Kabupaten Paniai	6525,25
81	Kabupaten Yahukimo	15057,9
82	Kabupaten Deiyai	537,39
83	Kabupaten Seruyan	16404
84	Kabupaten Tapin	2700,82
85	Kabupaten Paser	7730,88
86	Kabupaten Bitung	304
87	Kabupaten Kampar	10928,2
88	Kabupaten Kerinci	3807,28
89	Kabupaten Sarolangun	6174



LAMPIRAN 7

UMUR ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK

No.	Kabupaten/Kota	UMUR	PENDUDUK
1	Kota Banda Aceh	61	238814
2	Kota Sabang	52	40404
3	Kabupaten Aceh Jaya	15	86058
4	Kabupaten Aceh Utara	72	575895
5	Kabupaten Aceh Singkil	18	129963
6	Kota Langsa	16	182424
7	Kabupaten Nias	72	136115
8	Kota Binjai	67	267901
9	Kota Pematang Siantar	52	247411
10	Kota Solok	47	59317
11	Kota Bukittinggi	70	115986
12	Kota Padang	72	883767
13	Kota Padang Panjang	61	104499
14	Kota Payakumbuh	61	133639
15	Kabupaten Muara Enim	71	567450
16	Kota Lubuk Linggau	16	217119
17	Kabupaten Lahat	69	427320
18	Kota Palembang	72	1643488
19	Kota Jambi	60	610854
20	Kabupaten Merangin	67	335206
21	Kota Bekasi	35	2409083
22	Kota Depok	35	1809120
23	Kota Serang	10	630320
24	Kota Tangerang	24	1651428
25	Kabupaten Brebes	67	1792511
26	Kabupaten Cilacap	67	1888129
27	Kabupaten Purworejo	67	94800
28	Kabupaten Wonosobo	67	900653
29	Kota Magelang	67	1219371
30	Kota Pekalongan	67	224063
31	Kota Salatiga	67	18381
32	Kota Semarang	67	1815729
33	Kota Surakarta	67	557202
34	Kabupaten Bandung Barat	10	1531072
35	Kabupaten Cianjur	34	2246663
36	Kabupaten Purwakarta	49	921598

37	Kabupaten Sukabumi	72	2434221
38	Kota Surabaya	67	2827892
39	Kabupaten Sidoarjo	67	1827064
40	Kabupaten Gresik	60	1251754
41	Kota Madiun	67	740664
42	Kota Kediri	67	1627496
43	Kota Blitar	72	1126639
44	Kota Malang	16	834545
45	Kota Makassar	67	1334090
46	Kabupaten Sinjai	58	236497
47	Kabupaten Bone	66	717268
48	Kota Pare-Pare	57	132048
49	Kota Ternate	18	215524
50	Kota Tidore Kepulauan	14	11131
51	Kabupaten Kepulauan Sula	14	110507
52	Kabupaten Pulau Taliabu	5	47239
53	Kabupaten Bantul	67	911503
54	Kabupaten Kulon Progo	67	470520
55	Kota Yogyakarta	67	636660
56	Kabupaten Sleman	67	1093110
57	Kota Mataram	24	419506
58	Kabupaten Lombok Timur	59	1289907
59	Kabupaten Alor	25	209974
60	Kota Kupang	18	438005
61	Kabupaten Mempawah	18	301715
62	Kota Pontianak	58	655572
63	Kota Singkawang	16	232993
64	Kota Palangkaraya	60	258550
65	Kabupaten Kapuas	55	409862
66	Kabupaten Barito Timur	15	109949
67	Kabupaten Banjar	54	470160
68	Kota Balik Papan	58	619983
69	Kota Bontang	18	174292
70	Kota Samarinda	58	766015
71	Kota Nunukan	18	185449
72	Kota Manado	66	466176
73	Kota Tomohon	14	98013
74	Kabupaten Marauke	48	221886
75	Kota Jayapura	24	417492
76	Kabupaten Fakfak	14	84692
77	Kabupaten Raja Ampat	14	62861

78	Kabupaten Bangli	61	264945
79	Kabupaten Landak	18	443265
80	Kabupaten Paniai	10	117047
81	Kabupaten Yahukimo	13	187021
82	Kabupaten Deiyai	9	88145
83	Kabupaten Seruyan	15	180201
84	Kabupaten Tapin	52	164200
85	Kabupaten Paser	56	254503
86	Kabupaten Bitung	27	269396
87	Kabupaten Kampar	61	688204
88	Kabupaten Kerinci	59	253256
89	Kabupaten Sarolangun	18	246245



LAMPIRAN 8

HASIL UJI DAN REGRESI

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OPINI	89	3,00	4,00	3,8876	,31760
IPM	89	47,95	85,49	71,1733	7,35136
PENDIDIKAN	89	1,00	4,00	2,7528	,98027
PELATIHAN	89	,00	1,00	,5056	,50280
DPRD	89	20,00	50,00	36,0225	10,39993
LUAS	89	23,00	44071,00	3255,3072	6006,18228
UMUR	89	5,00	72,00	45,8315	23,12527
PENDUDUK	89	11131,00	2827892,00	633141,6292	652606,07368
Valid N (listwise)	89				

2. Uji Normalitas

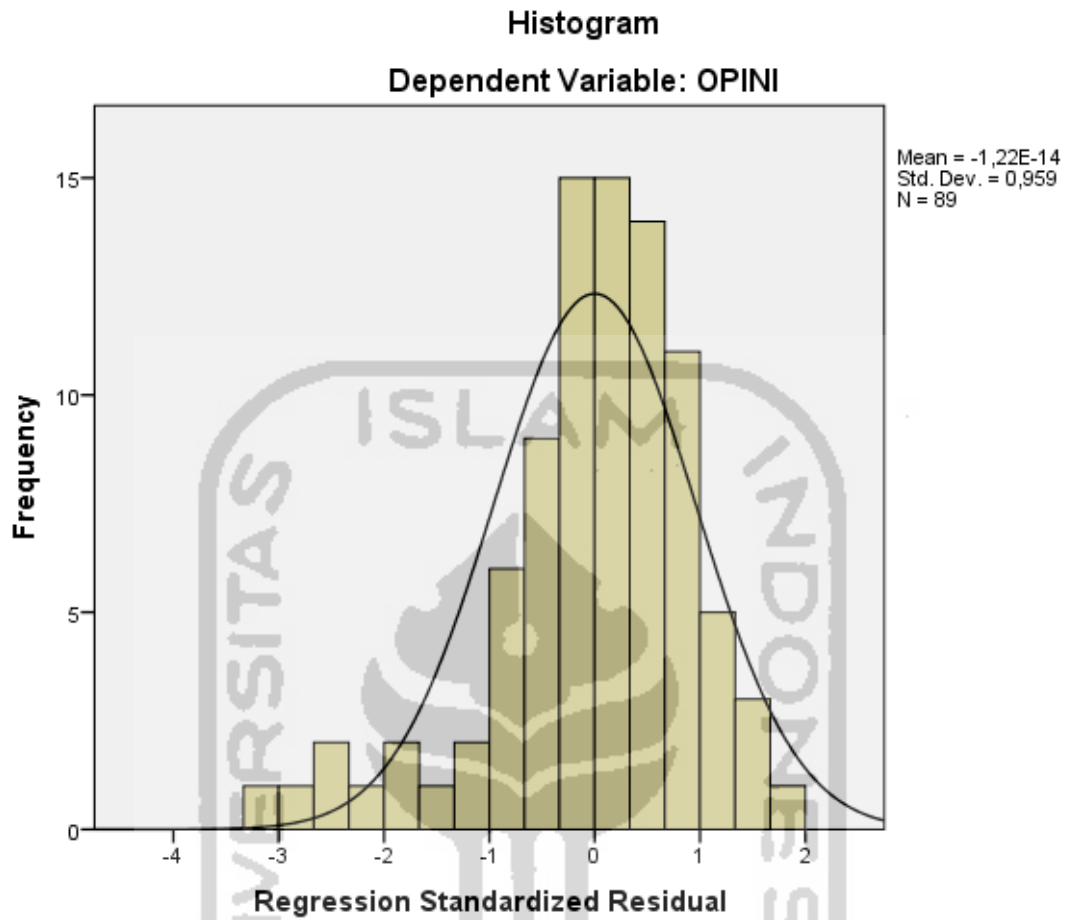
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,02796808
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,069
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,949
Asymp. Sig. (2-tailed)		,328

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil data Diolah, 2020



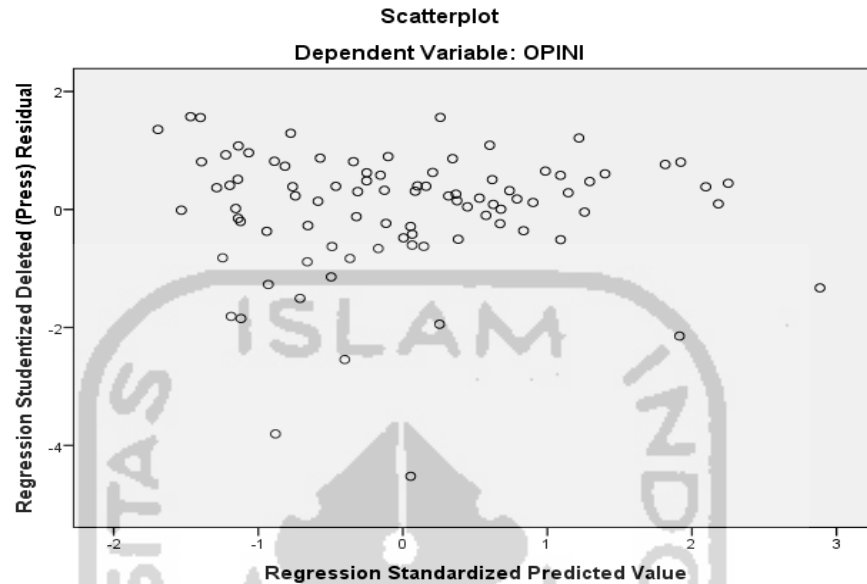
3. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	IPM	,565 1,769
	PENDIDIKAN	,839 1,193
	PELATIHAN	,959 1,042
	DPRD	,308 3,250
	LUAS	,689 1,452
	UMUR	,612 1,634
	PENDUDUK	,320 3,127

a. Dependent Variable: OPINI

4. Uji Heterokedastisitas



5. Analisis Regresi Berganda

Hasil Data Diolah, 2020

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,620	,166		-3,738	,000
IPM	,625	,088	,738	7,087	,000
PENDIDIKAN	-,001	,018	-,003	-,038	,969
PELATIHAN	,009	,006	,110	1,376	,173
DPRD	,010	,042	,033	,233	,817
LUAS	,015	,005	,308	3,261	,002
UMUR	,017	,013	,128	1,282	,203
PENDUDUK	-,007	,011	-,085	-,614	,541

a. Dependent Variable: OPINI

6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,709 ^a	,503	,460	,02915

